

DAMPAK PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP DEFORESTASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KABUPATEN KUBU RAYA

Hilda Putri Ghaisani ¹⁾, Aji Ali Akbar ²⁾, Dian Rahayu Jati ^{3*)}

^{1, 2, 3} Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

*E-mail Corresponding Author : D1051211022@student.untan.ac.id, aji.ali.akbar.2011@enviro.ac.id,
dianjati@teknik.untan.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Perhutanan sosial sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan negara telah menjadi salah satu strategi utama dalam mengurangi deforestasi dan menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Artikel ini merupakan kajian pustaka sistematis yang mengulas perkembangan konsep perhutanan sosial, bentuk-bentuk skema yang diterapkan, serta dampaknya terhadap lingkungan berdasarkan literatur terkini dan data tematik Kalimantan Barat. Ditemukan bahwa perhutanan sosial berperan penting dalam pengurangan laju deforestasi, peningkatan tutupan lahan, serta pelestarian spesies penting seperti orangutan dan flora khas hutan tropis. Dengan dukungan sistem informasi geografis dan analisis spasial, pola distribusi dan efektivitas program ini dapat dianalisis secara lebih akurat, terutama melalui pendekatan seperti *Nearest Neighbour Analysis*. Tinjauan ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pendekatan sosial-ekologis dan teknologi spasial merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan perhutanan sosial di masa depan.

Kata Kunci: Deforestasi, Hutan Desa, Keanekaragaman Hayati, Perhutanan Sosial.

Abstract: Social forestry as a community empowerment approach in the management of state forests has emerged as a key strategy to reduce deforestation and preserve biodiversity in Indonesia. This article is a systematic literature review that examines the development of the social forestry concept, the forms of implemented schemes, and their environmental impacts based on recent literature and thematic data from West Kalimantan. The findings indicate that social forestry plays a crucial role in decreasing deforestation rates, increasing forest cover, and conserving key species such as orangutans and unique tropical forest flora. With the support of Geographic Information Systems and spatial analysis, the distribution patterns and effectiveness of this program can be analyzed more accurately, particularly through approaches such as *Nearest Neighbour Analysis*. This review concludes that synergy between socio-ecological approaches and spatial technology is a critical foundation for the future sustainability of social forestry in Indonesia

Keywords: Biodiversity, Deforestation, Social Forestry, Village Forest

Article History:

Received: 01-09-2025

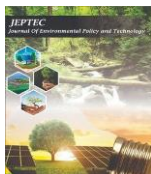
Revised : 20-09-2025

Accepted: 31-10-2025

Online : 10-11-2025



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*



LATAR BELAKANG

Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi kehutanan yang kaya, diharapkan dapat memanfaatkan program perhutanan sosial ini untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Kabupaten Kubu Raya, masih terdapat kurang lebih 960 ribu hektare (ha) kawasan hutan yang berpotensi untuk didorong mendapatkan persetujuan Perhutanan Sosial yang tertuang dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VIII. Luas Perhutanan Sosial saat ini yang dianalisis dari data spasial oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat adalah 133.667 ha.

Wilayah implementasi program Perhutanan Sosial di Kabupaten Kubu Raya tersebar di sejumlah kecamatan. Beberapa di antaranya meliputi Kecamatan Batu Ampar yang mencakup area seluas 76.370 hektar, Kecamatan Kubu dengan cakupan 18.506 hektar, Kecamatan Sungai Raya seluas 12.887 hektar, serta Kecamatan Teluk Pakedai dengan luasan 4.392 hektar. Selain itu, Kecamatan Sungai Ambawang memiliki 5.565 hektar kawasan Perhutanan Sosial, dan Kecamatan Kuala Mandor B mencakup sekitar 1.381 hektar (DLH Kalimantan Barat, 2023).

Satriadi dkk. (2020) dalam Mutaqin dkk. (2022) menjelaskan Perhutanan Sosial memiliki peluang besar dalam pengurangan lahan kritis, termasuk penurunan deforestasi. Perhutanan Sosial dapat menjadi prasyarat berhasilnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), mengingat pelaksanaan RHL secara swakelola oleh masyarakat memiliki tingkat keberhasilan dan kelangsungan tanaman RHL cenderung lebih baik.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat dampak dari perhutanan sosial dirasakan oleh masyarakat lokal dan berdampak pada pengelolaan alam secara keseluruhan. Fokus penelitian pada Kabupaten Kubu Raya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perhutanan sosial berpengaruh terhadap deforestasi dengan melihat perubahan tutupan lahan yang terjadi di area perhutanan sosial sebelum dan sesudah pelaksanaan program berjalan serta dampaknya terhadap keanekaragaman hayati.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian pustaka (*literature review*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Kajian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis berbagai sumber literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta data sekunder yang relevan mengenai perhutanan sosial di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan dampaknya terhadap deforestasi, keanekaragaman hayati, serta pendekatan spasial dalam pengelolaan hutan.

Sumber-sumber utama berasal dari jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi (misalnya: *Forest Policy and Economics*, *Biodiversity and Conservation*, dan *Environmental Management*), laporan pemerintah (BPS, KLHK), serta publikasi teknis lainnya dari lembaga seperti Katadata Insight Center dan dokumen kebijakan (Permen LHK No. 83/2016 dan Permen LHK No. 9/2021).

A. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama dalam upaya mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta penyediaan sumber daya bagi masyarakat sekitar. Namun, laju deforestasi yang tinggi akibat konversi lahan untuk pertanian, perkebunan, dan aktivitas ilegal telah menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem hutan, termasuk di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pemerintah Indonesia menerapkan Program Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan, hal ini tertuang dalam peraturan P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019).

Deforestasi didefinisikan sebagai proses transformasi penutup lahan dari kawasan berhutan menjadi area non-hutan, yang umumnya disebabkan oleh perubahan fungsi lahan untuk keperluan lain seperti pemukiman, pertanian, semak belukar, lahan terbuka, dan bentuk penggunaan lainnya (Pratiwi, 2024). Menurut temuan Nurdwiansyah dkk (2021), yang merujuk pada kajian Hardiansyah et al. (2014), dinamika deforestasi di wilayah Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya dipengaruhi oleh berbagai sektor. Pada ekosistem gambut, faktor utamanya adalah pembangunan kanal dan terjadinya kebakaran lahan. Di sektor pertanian, deforestasi terjadi akibat konversi kawasan berhutan untuk pertanian dan ekspansi lahan demi ketahanan pangan. Sektor kehutanan turut berkontribusi melalui aktivitas pembukaan lahan ilegal, penebangan liar, dan alih fungsi hutan alam untuk kegiatan non-kehutanan. Sektor perkebunan menyumbang deforestasi melalui pembukaan lahan untuk komoditas perkebunan, sedangkan sektor pertambangan berkontribusi melalui kegiatan penambangan emas ilegal dan pemanfaatan kawasan hutan untuk eksplorasi bauksit. Selain itu, pembangunan infrastruktur, seperti jaringan jalan di daerah perbatasan, juga menjadi salah satu pendorong utama hilangnya tutupan hutan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa perhutanan sosial mampu mengurangi laju deforestasi dengan cara meningkatkan pengawasan dan kontrol masyarakat terhadap kawasan hutan di sekitar mereka. Kastanya dkk. (2019) menyatakan bahwa masyarakat lokal cenderung menjaga kelestarian hutan jika diberi hak kelola secara legal melalui skema perhutanan sosial. Hal ini diperkuat oleh Fisher (2018), yang menemukan bahwa pelibatan masyarakat dalam tata kelola hutan mengurangi praktik penebangan liar (*illegal logging*).

Keanekaragaman hayati di wilayah tropis seperti Kalimantan Barat tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekosistem hutannya, terutama hutan primer. Jenis-jenis habitat seperti hutan rawa gambut, hutan mangrove, dan hutan hujan dataran rendah merupakan penopang utama bagi spesies-spesies kunci, salah satunya adalah orang utan (*Pongo pygmaeus pygmaeus*), yang ditemukan pada wilayah studi ini. Oleh karena itu, keberadaan dan perubahan habitat-habitat tersebut menjadi fokus penting dalam menganalisis dampak dari implementasi Program Perhutanan Sosial terhadap keanekaragaman hayati di Kabupaten Kubu Raya.

Studi Supriatna (2017) menunjukkan bahwa kepadatan sarang orangutan di hutan primer bisa mencapai 3,70 sarang/km², namun turun drastis menjadi 0,06

sarang/km² di hutan terdegradasi. Dengan demikian, program perhutanan sosial yang menjaga integritas hutan primer turut membantu konservasi spesies langka yang menjadi indikator kesehatan ekosistem.

Di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, program Hutan Desa yang mencakup lebih dari 132.000 ha menunjukkan potensi besar dalam mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan. Menurut Satriadi dkk. (2020), pelibatan masyarakat dalam rehabilitasi hutan, seperti penanaman pohon multi-manfaat dan pengembangan komoditas non-kayu, mendorong keberhasilan jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan analisis *Nearest Neighbour Analysis* (NNA) telah menjadi alat penting dalam mengevaluasi efektivitas perhutanan sosial secara spasial. NNA membantu mengidentifikasi pola persebaran areal perhutanan sosial apakah cenderung mengelompok (*clustered*), tersebar (*dispersed*), atau acak (*random*). Pola sebaran yang mengelompok sering kali menunjukkan konsentrasi intervensi kebijakan, sementara pola acak mengindikasikan distribusi program yang merata namun mungkin kurang terintegrasi.

Penggunaan citra satelit dan peta tutupan lahan juga mempermudah pemantauan perubahan penutupan hutan dari waktu ke waktu. Studi Amalia dkk. (2023) menggarisbawahi pentingnya SIG dalam perencanaan penggunaan lahan dan evaluasi keberhasilan program berbasis wilayah

SIMPULAN DAN SARAN

Perhutanan sosial di Indonesia bukan sekadar kebijakan pengelolaan hutan, melainkan transformasi sosial-ekologis yang memadukan pemberdayaan masyarakat, konservasi, dan teknologi spasial. Kajian ini menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak positif signifikan terhadap pengurangan deforestasi, pemulihan keanekaragaman hayati, serta memperkuat keadilan akses terhadap sumber daya hutan. Ke depan, diperlukan integrasi data spasial real-time dan evaluasi berbasis indikator keberlanjutan untuk meningkatkan efektivitas program ini secara menyeluruh dan adaptif.

UCAPAN TERIMA KASIH

ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memberikan suport penulis selama penyusun tugas ini dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aan. (2023, Agustus 20). Upaya Warga Melestarikan Hutan Desa Teluk Bakung, Pasang Tanda Batas Wilayah & Kembangkan Tanaman Pakan Ternak. Pontianak Post
- Amalia, D.F., Nugraha Q.S., Negara A.S. (2023). Pola Klaster Spasial: Studi Kasus mengenai Persebaran RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) di Kota Jakarta Pusat dengan Pendekatan Nearest Neighbor Analysis (NNA). *Jurnal Sains Geografi*, 1(2).
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2021. Tentang Data Tutupan Hutan
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2025).

- Hanjani, S.S., Ardiansyah Nadalia dan Sabiham. (2015). *Land Use Dynamics and Development of Oil Palm Plantation in Kubu Raya and Sanggau Regencies During 1990-201*, 17(1), 39–45.
- Hariato, D., Yansen, Y., Suhartoyo, H., Barchia, M. F., & Anwar, G. (2022). Laju Perubahan Penutupan Lahan dan Faktor-Faktor Yang Mendorong Perambahan Kawasan Hutan Bukit Balai Wilayah Pengelolaan UPTD KPH Wilayah XI Kikim-Pasemah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 11(2), 194–198.
- Kastanya, A., Tjoa, M., Mardiatmoko, G., Latumahina, F., Bone, I., dan Aponno, H. (2019). Kajian Dampak Perhutanan Sosial Wilayah Maluku-Papua. Program Studi Manajemen Hutan PPs Unpatti, 2019.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Status Hutan dan Keanekaragaman Hayati Indonesia 2022
- Lestari, S. C., Arsyad, J Muhammad, Negeri, U., Kampus, M., Parangtambung, U., Daeng, J., & Raya, T. (n.d.). *Studi Penggunaan Lahan Berbasis Data Citra Satelit Dengan Metode Sistem Informasi Geografis (Sig) 1*.
- Maimunah, Remario, Hendriansyah, Amin, Amrin, Faturrohman, Jay dan Bambang. (2023). Keanekaragaman Hayati, Kemanfaatan Hutan Dan Simpanan Karbon Hkm Sukses Manyam Sejahtera Di Lamandau Kalimantan Tengah. *Jurnal Hutan Tropis*. Vol 2.3. Instiper Yogyakarta
- Marshall, A.J. et al. (2006). The effects of forest quality on orang utan density and distribution. *Biological Conservation*, 135(2), 238–250.
- Mutaqin, D., Wahyuni dan Rahayu, N. (2022). Analisis Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19. *Bappenas Working Papers*. Volume V No.2 160
- Nurdwiansyah D., Hardiansyah G. Dan Roslinda E. (2021). Analisis Kinerja Penurunan Deforestasi Di 10 Izin Hutan Desa Kecamatan Batu Ampar. *Jurnal Tengawang*. Vol. 11 (1): 59 - 70
- Peraturan Menteri LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Pratiwi, S., A., Emma Pravitasari, A., Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, P., & Info, A. (2024). *Nabire Periode 2000-2019 Land Cover Change, Forest Degradation and Deforestation in Nabire*.
- Rosadi,E. (2024). Analisis Biaya Dan Manfaat Program Perhutanan Sosial Perhutani Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Di Rph Kuniran Bojonegoro Jawa Timur. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia
- Sani, K. (2013, April 6). Hutan Bakau Dibabat. Pontianak Post. P2
- Satriadi, T., Aryadi, M., dan Fauzi, H. (2020). Persepsi dan Sikap Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Tebing Siring terhadap Program Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Lebah Madu. *Jurnal Hutan Tropis*, 8 (2), 9.
- Satriadi, T., Hamidah, S., dan Thamrin, G. A. R. (2021). Buku Ajaran Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu. CV. Banyubening Cipta Sejahtera.
- Supriatna, J. (2017). *Keanekaragaman Hayati Indonesia: Dinamika, Ancaman, dan Strategi Konservasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia